BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada BAB II tentang landasan teori mengenai peran Disnakertrans dalam pemberdayaan TKI purna dan faktor penghambat, faktor pendukung Disnkertrans dan BAB III yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti serta BAB IV mengenai hasil penelitian, maka pada BAB V ini penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap data lapangan yang telah diperoleh dengan menggunakan teori yang terkumpul.

A. Peran Disnakertrans dalam pemberdayaan TKI Purna berbasis pengembangan UKM

Istilah "peran" kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata "peran" dikaitkan dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu drama.Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.[1] Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan

[1] W.J.S. Poerwadarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia...hlm. 735.

peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran.[2]

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ialah merupakan organisasi pemerintah yang menangani bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.[3] Disnakertrans merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang trasmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan *(power)* kepadapihak yang lemah *(powerless)* dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang berkuasa *(powerfull)* sehingga terjadi keseimbangan.[4] TKI Purna adalah warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara asing dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah sesuai ketentuan masing-masing Negara tujuan yang sudah habis atau selasai masa kerjanya atau masa kontraknya.[5]

---

[2] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013). Hal. 212-213

[3]https://idalamat.com/alamat/41130/dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kabupaten-tulungagung, diakses pada 15 Juni 2019

[4] https://www.academia.edu/29679117/konsep_pemberdayaan_masyarakat, diakses pada 05 Juni 2019

[5] Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban HukumTenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, (Yogyakarta: MedpressDigital, 2013), hlm. 10

Usaha kecil menengah adalah salah satu jenis usaha milik perorangan, badan usahanya tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha ini selain berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil, usaha menengah atau usaha besar. Usaha-usaha kecil di Indonesia adalah merupakan subjek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana.

Industri kecil menyumbang pembangunan dengan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angkatan kerja, fleksibelitas kebutuhan serta inovasi-inovasi dalam perekonomian secara seluruhnya. Untuk bersaing di perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, ada dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan dari kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi dan sistem manajemen. Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terdiri dari lingkungan domestik dan lingkungan global.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberdayaan tenaga kerja inonesia purna berbasis pengembangan usaha kecil menengah dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM dalam proses pembangunan Nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha

kecil adalah meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi dapat berperan dalam perekonomian nasional.[6]

Peran dinas Tenaga kerja dalam pemberdayaan TKI purna berbasis pengembangan UKM, hal ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yaitu Disnakertrans dalam memberdayakan TKI Purna selepas menjadi tenaga kerja migran. Rata-rata pekerja migran mempunyai modal dan rata-rata mereka pekerja keras. Disnakertrans mengakomodasi ratusan TKI purna sukses untuk membangun jaringan kewirausahaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Ratika Yuniasari dengan judul "Peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM sentra tas di desa loram kulon kecamatan jati Kabupaten Kudus". Dalam penelitiannya, Dian Ratika berpendapat Usaha kecil menengah merupakan salah satu roda penggerak kegiatan perekonomian di Indonesia. Saat ini dibutuhkan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM agar usaha tersebut mampu tetap eksis dan bertahan dalam arus perekonomian.

Hal ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Wahjuni dengan Judul "pemberdayaan mantan TKI melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal" dalam penelitiannya sri wahjuni mengatakan untuk mengetahui karateristik mantan TKI tersebut dari aspek sosial, budaya dan ekonomi, serta menganalisis potensi sumber daya alam dan sumber daya pendukung sehingga diharapkan dapat memberikan informasi mendasar untuk

[6] Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi skala kecil/menengah dan Koperasi*..., hal. 25

menyusun strategi pemberdayaan mantan TKI melalui pengembangan usaha sesuai dengan karakteristiknya dan sesuai dengan potensi lokal.

Dalam upaya memberdayakan Tenaga Kerja Indonesia Purna, Disnakertrans dalam membina permberdayaan TKI purna melalui pengembangan usaha kecil dan menengah meliputi mengidentifikasi TKI purna terkait bakat dan minat dan potensi lokal apa yang dapat di kembankan di daerahnya, kemudian di berikan pelatihan sesuai identifikasi. Disnakertrans juga membantu menjebatani permodalan untuk tambahan modal bagi TKI purna yang akan merintis usaha, menjembatani dalam pemasaran, bimbingan teknis serta pendampingan di lapangan. Dalam mewujudkan TKI Purna yang mandiri dan sukses membangun daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Dalam mewujudkan upaya tersebut disnakertrans berperan dalam:

1. Mengidentifikasi TKI Purna

Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan.[7] Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Disnakertrans mengidentifikasi TKI Purna di Tulungagung sesuai dengan asal daerah mereka, Disnakertrans melakukan identifikasi daerah kantong-kantong TKI purna, serta mengidentifikasi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai bahan yang dapat dijadikan sebagai potensi lokal yang bisa diolah menjadi sebuah bentuk. Mengidentifikasi bakat dan minat TKI purna.

[7] https://id.m.wikipedia.org/wiki/identifikasi. diakses pada 14 Juli 2019. Pukul 0:12 WIB

Identifikasi dalam program pemberdayaan agar memudahkan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan, yakni sebagai berikut:

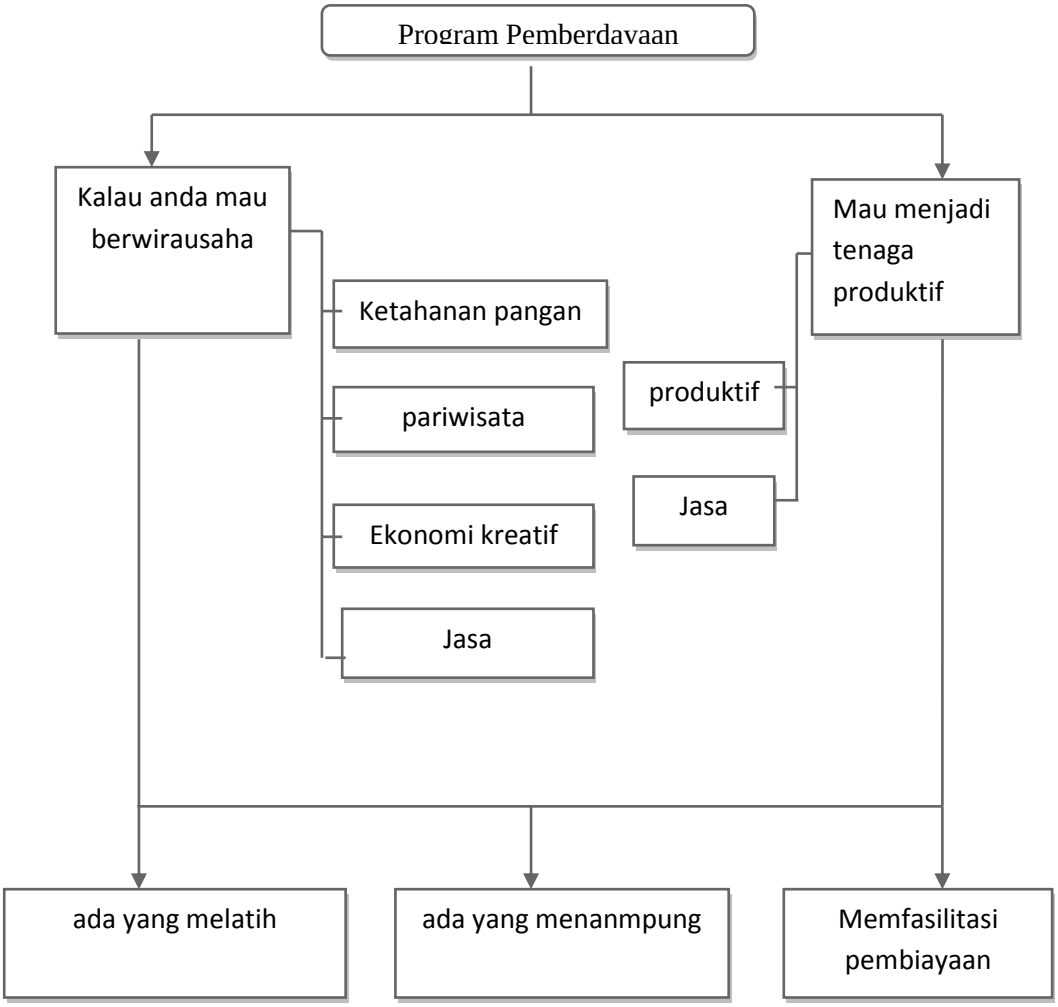

Ketika melakukan Identifikasi Tenaga Kerja Indonesia Purna dalam pemberdayaan, Dinas Tenaga Kerja mengidentifikasi, dimana tempat tinggal TKI purna dan apa yang menjadi bakat dan Minat TKI purna, kemudia potensi apa yang ada di daerah TKI purna yang nantinya bisa diolah sebagai bahan dan menjadikan potensi lokal. Ketika nanti sudah di analisis potensi lokal apa yang ada disana tahap selanjutnya diberikan pelatihan

2. Pelatihan

Pelatihan adalah strategi yang dilakukan oleh Dinsnakertrans dalam memberdayakan usaha binaan tenaga kerja Indonesia purna. Menurut teori Burhanudin Yusuf proses pelatihan sebaiknya dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan jenis keterampilan yang dimliki oleh para karyawan saat ini dan keterampilan yang mereka perlukan untuk mencapai rencana jangka pendek dan jangka panjang. Setelah data terkumpul dari bermacam-macam sumber, data tersebut dianalisis sehingga kebutuhan pelatihan dapat ditentukan.[8]

Menurut teori Mudrajad Kuncoro strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat melalui pembinaan untuk bidang usaha di daerah tertentu melalui Kelompok Usaha Bersama, Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan.[9] Sedangkan menurut Hadari Nawawi bahwa pelatihan pada dasarnya berarti proses memberikan bantuan bagi para TKI Purna untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaikikekurangan dalam melaksanakan pekerjaan. Pelaksanaan pelatihan sangat tergantung atau berkaitan erat dengan dua kegiatan Manajemen sumber daya manusia.[10]

Menurut tiktik sartika pramono tujan pembinaan dan pelatihan usaha kecil menengah adalah untuk mengembangkan usaha kecil menengah menjadi usaha besar. Ada dua aspek dalam pembinaan UKM yang harus diperhatikan

---

[8] Burhanuddin Yusuf, Manajemen, *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 143

[9] Kuncoro, *Masalah, Kbijakan, dan Politik Ekonomika Pembangun*an..., hal. 197

[10] Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber daya manusia*,....., hlm.216

yaitu sumber daya manusia dan pengelolaan. Dalam mengevaluasi pembinaan ,pertama-tama dimulai dengan proses peningkatan kemampuan mengelola (manajemen) di bidang pemasaran, keuangandan personalia. Kemudian meningkatkan kemampuan kegiatan operasional.[11]

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi yang menyatakan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.[12]Program pelatihan yang diadakan Disnakertrans dalam setahunnya empat kali pelatihan, yaitu mencakup 4 desa. Pelatihan yang diberikan bagaiman mengolah potensi lokal yang terdapat di daerah Kantong-kantong TKI, sesuai bakat dan minat TKI.

3. Permodalan

Modal adalah faktor utama yang harus disiapkan sebelum seseorang mendirikan usaha, bahkan jika usaha sudah berjalan namun kekurangan dalam modal, maka usaha bisa terhambat baik dalam proses produksi maupun distribusi. Menurut teori Lincolin Arsyad akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Mesin, peralatan dan barang alkan meningkatkan stok modal.[13] Menurut teori

---

[11] Tiktik Sartika Pramono, *Ekonomi skala kecil/menengah dan Koperasi*.., hal. 27.

[12] esti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, et. All, "Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pembersayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Malang", Jurnal Administrasi Publik Vol. 2, hal. 213-220, diakses pada 25 Juni 2019

[13] Lincolin Arsyad, *Ekonomi pembangunan edisi keempat*, (Yogyakarta: Adytia Media, 2012), hlm. 14

Mudrajad Kuncoro aspek permodalan meliputi bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit.[14] Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh maulana ibrahim yang mengatakan bahwa Peningkatan akses terhadap sumber modal ini di tempuh melalui peran sektor jasa keuangan yaitu pemerintah, swasta dan koperasi. Pemberian kredit ke UKM merupakan salah satu upaya dalam rangka penyebaran resiko perbankan, sementara suku bunga kredit UKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup.[15]dalam memberikan modal tambahan gabi TKI purna, Disnakertrans bekerjasama dengan pokmas yang mendapatkan SK, dan SK tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman.

4. Pemasaran

Salah satu peran Disnakertrans dalam pemberdayaan TKI Purna pemngembangan UKM yaitu dengan cara memasarkan produk tenaga kera indonesia purna. Menurut teori nurul huda Pemasaran memiliki peran pokok dalam peta bisnis suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap strategi produk. Kesuksesan suatu produk diterima oleh target pasar tidak hanya ditentukan oleh murahnya harga atau kualitas yang di tawarkan, tetapi ditentukan juga oleh strategi pemasran yang dilakukan. Pemasaran menjadi pendorong untuk meningkatkan penjualan sehingga tujuan perusahaan dapat

[14] Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*..., hal. 197

[15] Jurnal maulana ibrahim, *Peran Dinas Koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan usaha* kecil *menengah di Kota samarinda (studi di kelurahan jawa kecamatan samarinda ulu kota samarinda)*, ejournal ilmu pemerintah, 2016 ISSN 2477-2631 diakses pada 5 Juli 2019

tercapai.[16] Menurut darmanto Pemasaran tidak terbatas dalam bisnis saja, kapan saja berusaha meyakinkan seorang untuk berbuat sesuatu seperti donor darah, menghemat listrik, memilih pasangan itu telah terlibat dalam pemasaran. Jadi, pemasaran mempunyai makna kemasyarakat yang luas. Dalam menguasai pasar kita harus mencari-cari informasi pasar sehingga mengetahui kekuatan pasar dan produk atau jasa yang dibutuhkan. Membuat jaringan-jaringan bisnis agar dapat saling membantu dalam pemasaran. Selanjutnya juga kiat-kiat melakukan segmentansi, targeting.[17]

Menurut teori Mudrajad Kuncoro strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat melalui program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem bapak-anak angkat, keterkaitan hilir hulu *(backwar linkage),* modal ventura ataupun subkontrak.[18]Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana Ibrahim pembinaan para kelompok UKM pada peningkatan terhdap akses pasar sangat mempunyai peranan penting, dikarenakan dibidang pemasaran banyak UKM yang tidak mengetahui bagaimana memasarkan produk mereka. Selama ini mereka hanya pandai memproduksi dalam menghasilkan suatu barang akan tetapi tidak pandai dalam memasarkannya. Penelitian pembinaan dalam peningkatan akses pasar ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang pasar dalam negeri dari berbagai jenis produk yang dihasilkan khususnya produk UKM. pembinaan UKM melalui peningkatan akses pasar ini telah

---

[16] Nurul Huda, *pemasaran syariah teori dan aplikasi edisi pertama*, (Depok: Kencana,2017), hlm. 2

[17] Darmanto, *kiat percepatan kinerja UMKM dengan model strategi orientasi berbasis lingkungan*, (yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 10

[18] Kuncoro, masalah, kebijakan, dan ekonomika pembangunan....., hlm. 97

berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan peningkatan omset pada target pasarnya berupa bantuan peningkatan penampilan produk UKM, kemudian diselenggarakan program pameran atau pertemuan dagang yang biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Dengan pembinaan yang diberikan tersebut, para kelompok UKM akan lebih mudah dalam memasarkan produk mereka dan selanjutnya berkembang secara mandiri.

B. Pembahasan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat yang di hadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna pengembangan UKM

Disnakertrans dalam peran pemberdayaan kepada tenaga kerja indonesia purna terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna berbasis pengembangan UKM

a) Antusias TKI Purna sebagai pelaku usaha

Dalam proses pemberdayaan TKI Purna berbasis pengembangan UKM, tentunya pelatihan sangat penting dan dibutuhkan. Dengan adanya pelatihan ketrampilan dan kemampuan pelaku usaha akan semakin berkembang. Menurut frisdiantara kualitas sumber daya manusia dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara mencerminkan kualitas tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Patta Rapanna, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam

pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan kepada efisiensi mereka. Untuk mendorong agar sumber daya manusia dapat bekerja secara efisiensi dan maksimal.[19] Menurut jurnal maulana ibrahim, pelatihan-pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen para pelaku UKM. Para pelaku UKM begitu apresiatif dalam mengikuti pelatihan.

b) Agenda bazar setiap tahun

Untuk menunjang produk-produk dari TKI Purna Disnakertrans setiap tahunnya mengikutiberbagai bazar yang dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Bazar yang diadakan Disnaketrans untuk memperkenalkan produk-produk TKI purna agar masyarakat luas mengetahui produk-produk TKI purna. Program pemasaran yang diberikan Disnakertrans kepada para TKI purna melalui bazar menjadiakn produknya semakin dikenal pengunjung.

Menurut teori mudrajat strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dapat melalui aspek manajerial yang meliputi tingkat produktivitas/omzet/tingkat, utilitas/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hesti Kusuma Wardani Ambar Pratiwi mengembangkan promosi, guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar

[19] Patta Rapanna, *Ekonomi Pembangunan*, (Makasar: CV Sah Media, 2016), hlm. 38

diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan.[20] Disnakertrans dalam upaya pemberdayaan melalui kegiatan bazar adalah salah satu strategi dalam meningkatkan omzet penjualan sekaligus mengenalkan produk-produk ke masyarakat luas.

c) Mengurangi pengangguran

Pengangguran merupakan masalah yang di hadapi di Kabupaten Tulungagung. Salah satu mengurangi pengangguran yaitu dengan berwirausaha. Menurut teori irawan penanggulangan pengangguran telah merupakan pokok kebijaksanaan bagi negara sedang berkembang dan negara maju.[21]Menurut Moh Munir mengatakan Salah satu strategi pemberdayaan sektor UKM dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat, sehingga UKM lebih mampu berperan dalam percaturan ekonomi nasional. Menurut Mohammad Iqbal, harapan untuk mengatasi pengangguran adalah pada sektor usaha dengan usaha kecil menengah. Dinamika UMKM telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. UMKM menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan baru. Berkembangya industri kreatif mampu menggerakkan ekonomi rakyat, membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

---

[20] Hesti Kusuma Wardani Ambar Pratiwi, *et, All, "program Dinas Koperasi, dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di kota malang"*, jurnal administrasi publik vol.2 hal 213-220

[21] Irawan, *Ekonomi Pembangunan*...,hlm. 293

2. Faktor penghambat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam Pemberdayaan Tenga Kerja Indonesia Purna berbasis pengembangan UMKM

a. Tidak adanya tenaga konsultan

Hambatan Disnakertrans dalam pemberdayaan TKI Purna terkait tidak adanya tenaga konsultan. Menurut frisdiantara, kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi suatu negara mencerminkan kualitas tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Menurut Kusuma wardani, keterbatasan sumber daya manusia. selain terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan UKM, diantaranya adalah konsultan dan tenaga penyuluh. Peran dari pemerintah selaku pelopor, yaitu pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat Disini Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dengan terbatasnya pegawai yang berkompeten dalam hal UKM bagaimana bisa menjadi panutan jika kompetensi sumber daya manusia yang dimilki saja masih kurang. Maka dari itu, Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya. Menurut Tulus Tambunan penumbuhan iklim usaha dapat melalui dukungan dari lembaga yaitu mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selain itu

juga dapat melalui pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Tidak adanya tenaga konsultan yang ahli adalah salah satu faktor penghambat Disnakertrans dalam memberdayakan usaha binaan karena tenaga konsultan sangat diperlukan oleh usaha binaan yang mengalami kesulitan dalam proses produksi.

b) Terbatasnya ketersediaan teknologi

Teknologi adalah salah satu alat penunjang untuk menjalankan sebuah usaha, alat teknologi bisa berupa mesin produksi, alat pengemasan atau alat bantu lainnya. Namun jika alat teknologi tidak tersedia pemilik usaha harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha. Menurut teori patta, kemajuan teknologi merupakan faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dan perubahan atau kemajuan teknologi tersebut dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi lainnya. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c) Terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan

Pelatihan adalah salah satu program untuk mewujudkan strategi Disnakertrans dalam memberdayakan TKI Purna. Pelatihan harusnya dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan TKI Purna. Namun kenyataannya Disnakertrans tidak bisa memenuhi permintaan TKI purna

karena terbatasnya anggaran dana. Menurut Tulus Tambunan penumbuhan iklim usaha dengan memberikan jaminan transparasi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.[22] Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Dwi Sepriono Nur keterlambatan dalam penyediaan anggaran untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan dan dukungan bagi pelaku UKM.[23] Keterbatasan anggaran dana adalah salah satu faktor penghambat Dinas Komidag dalam memberdayakan TKI purna dalam pengembangan UKM karena pelatihan sangat diperlukan oleh TKI Purna dari berbagai sektor, sedangkan jika pelatihan dilakukan empat kali dalam satu tahun. Hal tersebut akan berdampak pada target realisasi kegiatan yang kurang maksimal dan secara tidak langsung akan menyebabkan penurunan kinerja Disnakertrans dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha binaan.

d) Karakter manusia

Karakter atau watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluq hidup lainnya. Keterampilan membuat keputusan merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik untuk memecahkannya. Disnakertrans dalam pemberdayaan tenaga kerja

---

[22] Ibid., Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*,...hal. 20

[23] Dwi Sepriono Nur, *"Peran Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) di Kota Samarinda"*, eJournal Administrasi Negara Vol. 5 No. 2, 2017

Indonesia purna berbasis pengembangan UKM, dalam memberikan pelatihan memaksimalkan perannya, agar pelaihan yang diberikan bisa terserap tenaaga kerja, akan tetapi tidak dapat dipungkiri karakter manusia ada jiwa pemimpin dan ada jiwa pekerja. Menurut teori Sadono sukirno di dalam bidang psikologi, sifat kewirausahaan dikaitkan dengan erilaku diri yang lebih cenderung kepada fokus dari dalam diri, dimana keberhasilan dicapai dari hasil kekuatan dan usaha diri, bukan karena faktor nasib.

C. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna pengembangan Usaha Kecil Menengah

Al Qur'an adalah wahyu yang diturunkan untuk seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, guna menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya.[24]

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ﴿١٠﴾

Artinya: "sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adagan bagimu di muka bumi (sumber)

[24]https://lppm.uhamka.ac.id/2016/12/05/pemberdayaan-dalam-prespektif-islam/. Diakses pada 5 Juli 2019

> penhidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur." (QS. Al-A'raf (7):10)[25]

Di dalam Al Qur'an dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara diantara pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Upaya dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan tenaga kerja indonesia merupakan upaya pemerintah dalam menjadi tenaga kerja Indonesia berdaya di negeri sendiri dan tidaka akan kembali bekerja di luar negeri. Sebagai firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 yang Artinya:

> "sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia". (Q.S ar-ra'd: 11)

Dari ayat di atas sangat jelas Allah Menyatakan, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam ayat ini manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata. Kegiatan yang berupaya untuk menyadarkan agar dapat menggunakan serta memilih kehidupannya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dalam segala aspek. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya *(empowerment)* atau pengguna

[25] Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajaj, *shalih muslim, Juz I* (Libanan: Fikr, 1414H/1993M) hlm 381

(strengthening) kepada masyarakat. Keberdayaan diartikan sebagai kemampuan individu dalam membangun keberdayaan.[26]

Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel yaitu:[27]

a. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil,
b. Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan,
c. Kemampuan menghadapi ancaman dan serangan luar

Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ke eksistensinya bersama bangsa dan negara. Islam merupakan sistem hidup sebagai suatu pedoman hidup, ajaran islam yang terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu aqidah, akhlak dan bidang muamalah. Kegiatan ekonomi *(muamalah)* sebagai salah satu bentuk implementasi dari hubungan antar sesama manusia *(habluminannas)*, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akidah, ibadah dan akhlak. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa manusia harus bekerja karena manusia bekerja juga tidak lepas dari pengawasan Allah SWT.

---

[26] Aprillia Theresia, et.al., *Pemberdayaan berbasis masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 115

[27] http://suaramedannws.com/konsep-pemberdayaan-ekonomi-islam/. Diakses pada 10 mei 2019

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴿١٠٥﴾

Artinya: “dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9):105)[28]

Ekonomi menurut islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem ekonomi secara umum. Ekonomi menurut islam bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Pengembangan ekonomi dalam islam mengindikasikan bahwa perhatian islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah dan yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya.

Meningkatkan kemampuan produksi, mengembangkan sistem dan metodenya, merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kehidupan yang mendasar dan memerangi kemiskinan. Kemajuan ekonomi digital harus dimanfaatkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya dalam usaha memberdayakan TKI Purna berbasis pengembangan UKM. Keterbukaan ekonomi dalam era ekonomi digital akan mendorong kolaborasi antara pelaku ekonomi kecil dan industri besar sehingga tercipta efek *trickle down* yang dapat mendorong

[28] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilail Quran*, jilid II (Beirut: Darusy-syuruq, 1412 H/1992M) hlm. 221

terciptanya ekonomi berkeadilan. Allah telah menciptakan manusia di bumi dengan segala kebaikan-Nya, dan juga memberikan kepahaman akan pengetahuan kepada manusia sebagaimana hal ini Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 269

يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاۤءُۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴿٢٦٩﴾

Artinya : "Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran As Sunah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Barang siapa yang dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya ora-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)." (QS. Al-Baqarah (2):269)

Pemberdayaan ekonomi umat setara dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, harus dibangun dengan prinsip keseimbangan yakni menguatkan yang lemah tanpa melemaahkan yang kuat. Karena dibutuhkan sinergi yang kuat antar semua pihak, baik usaha kecil, usaha besar dan pemerintah.[29] Dalam prinsip ekonomi syariah, penopang utama perekonomian adalah sektor rill, sedangkan sektor moneter hanya sebagai pendukung.

Prinsip ekonomi syariah menekankan perlunya menekankan perlunya menggerakkan sektor rill yang minus kegiatan maisir, gharar, riba, serta berbasis hal haram dan manfaat mudarat. Perekonomian yang dibangun di atas kekuatan sektor rill bertumpu pada produktivitas seluruh level masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil dan proposional, hingga membentuk mata rantai perekonomian yang stabil dan tidak mudah goyah

[29]http://m.tribunnews.com/bisnis/2019/03/13/ra-digitalisasi-dorong-pemberdayaan-ekonomi-umat. diakses pada 15 mei, pukul 09.00 WIB

atau mengalami tekanan. Berbedaha halnya jika penompang utama perekonomian adalah sektor keuangan yang rentan melibatkan unsur maisir, gharar, riba dan mengabaikan pertimbangan halal haram serta manfaat mudarat. Bangunan perekonomian tersebut akan rentan mengalami tekanan ketika besar, karena mata rantai ekonomi yang terbentuk tidak memiliki komprehnsif dikarenakan tidak berkontribusi secara rill dengan seluruh unsur ekonomi, yang meliputi konsumen, produsen, barang/jasa rill, kejelasan transaksi, nilai moral dan etika yang sejalan dengan halal haram serta manfaat mudarat.[30]

[30]https://m.republika.co.id/berita/nasional/opini/11/10/02/lsf53r-umkm-indonesia-vs-prinsip-ekonomi-syariah. diakses pada 15 mei,pukul 09.25